



RENJA AWAL 2026

KECAMATAN KINTAP



**JL.A YANI RT 002 RW 001
DESA KINTAPURA**

KINTAP.BERSINERGI@GMAIL.COM

**IG: KECAMATAN KINTAP
FB: KECAMATAN KINTAP**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KINTAP**

Jl. A. Yani No. 07 Kintap Kode Pos 70883 Email : kintap.bersinergi@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KINTAP
NOMOR : 2 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran VI Bagian E poin E.2b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Daerah, maka perlu menyusun Renja Kecamatan Kintap Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kintap Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

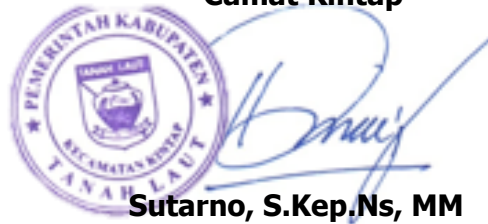
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Tanah Laut;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Tanah Laut;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
16. Surat edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 000.1.3 /49 / Bapperida / 2025 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Camat Kintap tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kintap Tahun 2026.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kintap Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kintap Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan capaian kinerja SKPD.
- Keempat : Agar seluruh personil pada Kecamatan Kintap mempedomani serta melaksanakan dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kintap
Pada tanggal : 15 Januari 2025

Camat Kintap



Sutarno, S.Kep.Ns, MM

Pembina Tk 1 (IV/b)

NIP. 19731006 199602 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KINTAP
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2026**

| No. | Nama Jabatan | Jabatan dalam Tim |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. | Kepala SKPD | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris | Ketua Tim |
| 3. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Sekretaris |
| 4. | Kasi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 5. | Kasi PMD | Anggota |
| 6. | Kasi Trantib | Anggota |
| 7. | Kasi Kemasyarakatan | Anggota |
| 8. | Kasi Pelayanan | Anggota |
| 9. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |



Camat Kintap,

Sutarno, S.Kep.Ns, MM
Pembina Tk 1 (IV/b)
NIP. 19731006 199602 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena berkat rahmatNya jualah, maka akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kintap tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2026 disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 356 ayat (1) poin (a), peraturan Kepala daerah tentang perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan perubahan Renja perangkat daerah.

Tersedianya data dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2026 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Kintap yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Kintap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Banyak kekurangan yang terdapat dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kintap tahun 2026 ini, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kintap tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja khususnya aparat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua.Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kintap, 17 Januari 2025

Camat Kintap



Sutarno, S.Kep, Ns. MM

Pembina Tk 1 (IV/b)

NIP. 19731006 199602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan panduan-panduan terkait tahapan proses perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi untuk kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 16. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi

- Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
 19. Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut 2024
 20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026
 21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja SKPD Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur proses perencanaan selanjutnya.

Rancangan awal tersebut disusun dengan mengacu pada Prioritas Daerah, Sasaran dan Pagu Indikatif.

Adapun tujuan penyusunan Renja SKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja SKPD bertujuan menopang IKU Kecamatan yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan sebesar bernilai B .
2. Acuan Kantor Kecamatan Kintap dalam proses menyusun program dan kegiatan SKPD Kantor Kecamatan Kintap tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Kintap.
3. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan, baik untuk tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan tersebut.

4. Untuk mengetahui besaran pagu indikatif yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2026 dibuat sebagai berikut :

| | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan Berisi uraian tentang Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan. |
| Bab II | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024 Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja kantor kecamatan Kintap tahun lalu dan capaian renstra kantor kecamatan Kintap, analisis kinerja pelayanan kantor kecamatan Kintap, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor kecamatan Kintap, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| Bab III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja kantor kecamatan Kintap. |
| Bab IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Berisi tentang Uraian Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2026 |
| Bab V | Penutup |

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN KINTAP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Kintap.

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat Daerah tahun lalu 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 sampai dengan akhir tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kintap berjalan sebagaimana yang diharapkan artinya tepat sasaran, sedangkan untuk tahun berjalan 2025 sampai dengan triwulan I atau tepatnya sampai Bulan Januari dalam realisasinya kegiatan Belanja antara lain Belanja Pegawai, belanja Rapat, belanja pemeliharaan, belanja kegiatan dan belanja modal Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang dihadapi misalnya terkendalanya pengajuan Uang Persediaan (UP) karena menunggu Surat Keputusan dari Bupati Tanah Laut dan juga penginputan SIRUP yang berakibat pada sulitnya pelaksanaan kegiatan yang sudah tersusun serta ketidak-jelasan regulasi atau peraturan lainnya yang tidak relevan dengan kondisi pada saat ini.

Dalam dokumen Renja Kantor Kecamatan Kintap tahun lalu yaitu tahun 2025 memuat program sebanyak 5 (lima) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, sedangkan pada tahun 2026 memuat program sebanyak 6 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPD Revisi Kantor Kecamatan Kintap, maka Kantor Kecamatan Kintap dalam upaya menjalankan visi dan misi tersebut

selama 3 (tiga) tahun ke depan yang pada tahun 2026 merupakan tahun ketiga masa pelaksanaan RPD Kantor Kecamatan Kintap 2024-2026.

Penyusunan Renja SKPD Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya sampai dengan akhir masa Renstra Tahun 2026;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
- e. serta Penyederhanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja SKPD Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2026

juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024 sampai akhir Desember sisi keuangan sudah tercapai yaitu 85,81%, dan sisanya 14,19% belum terealisasi, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2024 rata-rata adalah 96 % sisanya 4 % belum terealisasi.

Berikut beberapa program/ kegiatan yang capaian kinerja nya tidak terpenuhi dibawah 80 % sebagai berikut :

1. Dari 6 Program yang ada, realisasi anggaran semua diatas 80 %
2. Ada 1 (satu) Kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 80 %, yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan Capaian 79,93 %.
Penyebab tidak tercapainya realisasi serapan ini karena kosong nya 2 (dua) pejabat Kasi dan hanya diisi oleh pelaksana tugas menyebabkan serapan tidak maksimal.
3. Adapun diluar 1 (satu) kegiatan tersebut, realisasi program/ kegiatan tahun 2024 yang capaian fisik nya telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan atau realisasi keuangannya di atas 80 % diuraikan pada table berikut :

**Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Kintap**

| Program/Kegiatan | Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024) | |
|--|---|---------------|---|---------------|---|--------|---|---------------|
| Semua Bidang | | | | | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 93 | 3.291.396.525 | - | 2.751.562.979 | 0,00% | 83,60% | 91,50 | 2.751.562.979 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 9.948.766 | - | 9.708.800 | 0,00% | 97,59% | 0,00 | 9.708.800 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 | 6.473.092 | 7 | 6.367.200 | 100,00% | 98,36% | 7,00 | 6.367.200 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|----|---------------|---------|---------|-------|---------------|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 3.475.674 | 4 | 3.341.600 | 100,00% | 96,14% | 4,00 | 3.341.600 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 2.412.389.318 | - | 1.923.375.928 | 0,00% | 79,73% | 0,00 | 1.923.375.928 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11 | 2.408.919.259 | 47 | 1.920.057.928 | 100,00% | 79,71% | 47,00 | 1.920.057.928 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 19 | 3.470.059 | 19 | 3.318.000 | 100,00% | 95,62% | 19,00 | 3.318.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 8.658.000 | - | 7.909.000 | 0,00% | 91,35% | 0,00 | 7.909.000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 12 | 8.658.000 | 11 | 7.909.000 | 91,67% | 91,35% | 11,00 | 7.909.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 335.624.310 | - | 325.000.081 | 0,00% | 96,83% | 0,00 | 325.000.081 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2 | 6.051.303 | 2 | 5.343.340 | 100,00% | 88,30% | 2,00 | 5.343.340 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 | 32.453.007 | 4 | 28.839.660 | 100,00% | 88,87% | 4,00 | 28.839.660 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| Penyediaan Bahan/Material | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 100,00% | 100,00% | 2,00 | 20.000.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 277.120.000 | 12 | 270.817.081 | 100,00% | 97,73% | 12,00 | 270.817.081 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|----|-------------|---------|--------|-------|-------------|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 146.230.860 | - | 116.297.473 | 0,00% | 79,53% | 0,00 | 116.297.473 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| Pengadaan Mebel | 1 | 4.890.491 | 1 | 4.171.603 | 100,00% | 85,30% | 1,00 | 4.171.603 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8 | 57.569.859 | 8 | 54.545.000 | 100,00% | 94,75% | 8,00 | 54.545.000 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 14 | 83.770.510 | 14 | 57.580.870 | 100,00% | 68,74% | 14,00 | 57.580.870 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 279.120.185 | - | 271.636.422 | 0,00% | 97,32% | 0,00 | 271.636.422 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 46.220.453 | 12 | 40.531.414 | 100,00% | 87,69% | 12,00 | 40.531.414 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | 232.899.732 | 12 | 231.105.008 | 100,00% | 99,23% | 12,00 | 231.105.008 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 99.425.086 | - | 97.635.275 | 0,00% | 98,20% | 0,00 | 97.635.275 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----|------------|---------|--------|-------|------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 | 37.000.000 | 1 | 36.971.800 | 100,00% | 99,92% | 1,00 | 36.971.800 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 | 47.500.000 | 6 | 47.088.475 | 100,00% | 99,13% | 6,00 | 47.088.475 |
| Pemeliharaan Mebel | 10 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22 | 11.600.000 | 22 | 10.450.000 | 100,00% | 90,09% | 22,00 | 10.450.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | 3.325.086 | 3 | 3.125.000 | 100,00% | 93,98% | 3,00 | 3.125.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 92 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 90,50 | - |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 92 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 90,50 | - |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| | 100 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---|-------------|---------|--------|-------|-------------|
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 | - | 1 | - | 100,00% | 0,00% | 1,00 | - |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 92 | 25.638.000 | - | 23.715.000 | 0,00% | 92,50% | 90,50 | 23.715.000 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 | | - | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 25.638.000 | | 23.715.000 | | 92,50% | | 23.715.000 |
| | 100 | | - | | 0,00% | | 0,00 | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 | 25.638.000 | 1 | 23.715.000 | 100,00% | 92,50% | 1,00 | 23.715.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 92 | 788.448.835 | - | 745.584.750 | 0,00% | 94,56% | 90,50 | 745.584.750 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 | 788.448.835 | - | 745.584.750 | 0,00% | 94,56% | 0,00 | 745.584.750 |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------|-------------|---------|--------|---------|-------------|
| | 100 | | - | | 0,00% | | 0,00 | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 17 | 99.172.460 | 17 | 80.969.000 | 100,00% | 81,64% | 17,00 | 80.969.000 |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 20 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 2000 | 648.676.375 | 2.000 | 633.980.750 | 100,00% | 97,73% | 2000,00 | 633.980.750 |
| Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 12 | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 8 | 40.600.000 | 8 | 30.635.000 | 100,00% | 75,46% | 8,00 | 30.635.000 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----|------------|---------|--------|-------|------------|
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 92 | 17.955.000 | - | 17.325.000 | 0,00% | 96,49% | 90,50 | 17.325.000 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | | - | | 0,00% | | 0,00 | |
| | | 17.955.000 | | 17.325.000 | | 96,49% | | 17.325.000 |
| | 100 | | - | | 0,00% | | 0,00 | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 28 | 12.880.000 | 28 | 12.600.000 | 100,00% | 97,83% | 28,00 | 12.600.000 |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 | 5.075.000 | 2 | 4.725.000 | 100,00% | 93,10% | 2,00 | 4.725.000 |

Pagu Rp 4.123.438.360

Serapan Rp3.538.187.729

Persentase Capaian 85,81%

Pada Tahun 2024 ini, Tidak ada realisasi program/ kegiatan tahun 2024 yang capaian fisiknya melebihi 100 % dari target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Berikut ini juga kami sampaikan Tabel Evaluasi Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel Evaluasi Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024
Kecamatan Kintap

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target 2024 | Realisasi 2024 | Capaian | Keterangan Tidak Tercapai |
|--|--|--|---|------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | | | Indek Desa | Nilai | 0,74 | 0,79 | 100,07 % | |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik | | Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan | Persentase | 25 % | 21,43 % | 85,72 % | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 90 | 88,05 | 97,83 % | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Kintap | Nilai | 91 | 89,90 | 98,79 % | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|-------|-------|-------|---------|--|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | | | Nilai SAKIP Kabupaten | Nilai | 70,01 | | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap | | Nilai SAKIP kecamatan Kintap | Nilai | 80 | 63,75 | 79,68 % | |
| | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | 90 | 88,05 | 97,83% | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | 90 | 88,05 | 97,83% | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | 90 | 88,05 | 97,83% | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | 90 | 88,05 | 97,83% | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | 90 | 88,05 | 97,83% | |

Dan kami sampaikan Juga **Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (kecamatan Kintap) s/d Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut**


Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
 TRIWULAN IV
 Kintap

P

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) | Target Akhir Periode Renstra | Realisasi Kinerja Renstra sampai dengan Renja | Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024/4thr Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%) | SKPD Penanggungjawab | Keterangan | | | | | |
|--------------|---------|---|--|------------------------------|---|--|--|-----|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---|---|--|---|----------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12/7x100% | 14 = 6 + 12 | 15=14/5 x100% | 16 | 17 | | | | | | | | | |
| Semua Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KINTAP | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP (%) | 92,00 | 11.853.241.273 | 0,00 | - | 93 | 3.291.396.525 | 704.270.699 | 725.137.178 | 551.764.597 | 770.390.505 | 2.751.562.979 | 0,00% | 83,60% | 91,50 | 2.751.562.979 | 23,21% | Kintap | | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen) | | 29.509.767 | 0,00 | - | 100 | 9.948.766 | 2.802.400 | - | - | 6.906.400 | 9.708.800 | 0,00% | 97,59% | 0,00 | 9.708.800 | 64,41% | | | | | | |
| | | Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) () | | 18.004.396 | 0,00 | - | 7 | 6.473.092 | 1.688.000 | 2 | - | 4.679.200 | 7 | 6.367.200 | 100,00% | 98,36% | 7,00 | 6.367.200 | 0,00% | 35,36% | Tidak Ada | | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | | 11.505.371 | 0,00 | - | 4 | 3.475.674 | 1.114.400 | 2 | - | 2.227.200 | 4 | 3.341.600 | 100,00% | 96,14% | 4,00 | 3.341.600 | 0,00% | 29,04% | Tidak Ada | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen) | 100,00 | 7.820.123.793 | 0,00 | - | 100 | 2.412.389.318 | 457.431.583 | - | 555.088.266 | 416.949.574 | 493.906.505 | 1.923.375.928 | 0,00% | 79,73% | 0,00 | 1.923.375.928 | 0,00% | 53,47% | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | | 7.808.636.809 | 0,00 | - | 11 | 2.408.919.259 | 455.846.783 | 12 | 555.088.266 | 416.949.574 | 492.173.305 | 47 | 1.920.057.928 | 100,00% | 79,71% | 47,00 | 1.920.057.928 | 0,00% | 24,59% | Tidak Ada | | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | | 11.486.984 | 0,00 | - | 19 | 3.470.059 | 1.584.800 | 5 | - | 5 | 4 | 1.733.200 | 19 | 3.318.000 | 100,00% | 95,62% | 19,00 | 3.318.000 | 0,00% | 28,88% | Tidak Ada | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) | 0,00 | - | 0,00 | - | 100 | 8.658.000 | 7.909.000 | - | - | - | - | 7.909.000 | 0,00% | 91,35% | 0,00 | 7.909.000 | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | | Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | | - | 0,00 | - | 12 | 8.658.000 | 7.909.000 | - | - | - | - | 11 | 7.909.000 | 91,67% | 91,35% | 11,00 | 7.909.000 | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) | 100,00 | 764.340.210 | 0,00 | - | 100 | 335.624.310 | 59.473.975 | - | 86.893.001 | 52.518.800 | 126.114.305 | 325.000.081 | 0,00% | 96,83% | 0,00 | 325.000.081 | 0,00% | 134,51% | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 20.058.663 | 0,00 | - | 2 | 6.051.303 | 2.026.750 | 1 | - | - | 3.316.590 | 2 | 5.343.340 | 100,00% | 88,30% | 2,00 | 5.343.340 | 0,00% | 26,64% | Tidak Ada | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | | 107.441.547 | 0,00 | - | 4 | 32.453.007 | 10.529.100 | 1 | 1.300.000 | 1 | 4.781.600 | 1 | 12.228.960 | 4 | 28.839.660 | 100,00% | 88,87% | 4,00 | 28.839.660 | 0,00% | 26,84% | Tidak Ada |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | | 9.000.000 | 0,00 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada | | | |
| | | Penyediaan Bahan/Material | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | | 60.000.000 | 0,00 | - | 2 | 20.000.000 | - | - | - | - | 2 | 20.000.000 | 100,00% | 100,00% | 2,00 | 20.000.000 | 0,00% | 33,33% | Tidak Ada | | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | 567.840.000 | 0,00 | - | 12 | 277.120.000 | 46.918.125 | 3 | 85.593.001 | 3 | 47.737.200 | 3 | 90.568.755 | 12 | 270.817.081 | 100,00% | 97,73% | 12,00 | 270.817.081 | 0,00% | 47,69% | Tidak Ada |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|---------------|------|---|-----|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|----|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------|---------|-----------|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100,00 | 2.027.000.000 | 0,00 | - | 100 | 146.230.860 | - | 58.716.603 | - | - | - | - | - | 57.580.870 | - | 116.297.473 | 0,00% | 79,53% | 0,00 | 116.297.473 | 0,00% | 91,22% | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) | | 832.000.000 | 0,00 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada |
| | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan* (unit) | | 55.000.000 | 0,00 | - | 1 | 4.890.491 | 1 | 4.171.603 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.171.603 | 100,00% | 65,30% | 1,00 | 4.171.603 | 0,00% | 7,58% | Tidak Ada |
| | Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 90.000.000 | 0,00 | - | 8 | 57.569.859 | 4 | 54.545.000 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 54.545.000 | 100,00% | 94,75% | 8,00 | 54.545.000 | 0,00% | 60,61% | Tidak Ada |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 800.000.000 | 0,00 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 250.000.000 | 0,00 | - | 14 | 83.770.510 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 57.580.870 | 14 | 57.580.870 | 100,00% | 68,74% | 14,00 | 57.580.870 | 0,00% | 23,03% | Tidak Ada |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100,00 | 807.772.503 | 0,00 | - | 100 | 279.120.185 | - | 66.656.038 | - | 68.054.736 | - | 68.383.223 | - | 68.542.425 | - | 271.636.422 | 0,00% | 97,32% | 0,00 | 271.636.422 | 0,00% | 63,10% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | | 6.000.000 | 0,00 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | 145.264.281 | 0,00 | - | 12 | 46.220.453 | 3 | 9.110.614 | 3 | 10.139.958 | 3 | 10.560.855 | 3 | 10.719.987 | 12 | 40.531.414 | 100,00% | 87,69% | 12,00 | 40.531.414 | 0,00% | 27,90% | Tidak Ada |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan) | | 656.508.222 | 0,00 | - | 12 | 232.899.732 | 3 | 57.545.424 | 3 | 57.914.778 | 3 | 57.822.368 | 3 | 57.822.438 | 12 | 231.105.008 | 100,00% | 99,23% | 12,00 | 231.105.008 | 0,00% | 35,20% | Tidak Ada |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) | 100,00 | 404.495.000 | 0,00 | - | 100 | 99.425.086 | - | 51.281.100 | - | 15.101.175 | - | 13.913.000 | - | 17.340.000 | - | 97.635.275 | 0,00% | 98,20% | 0,00 | 97.635.275 | 0,00% | 116,04% | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | | 109.000.000 | 0,00 | - | 1 | 37.000.000 | - | 16.811.800 | 1 | 9.845.000 | - | 4.415.000 | - | 5.900.000 | 1 | 36.971.800 | 100,00% | 99,92% | 1,00 | 36.971.800 | 0,00% | 33,92% | Tidak Ada |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit) | | 198.000.000 | 0,00 | - | 6 | 47.500.000 | - | 25.944.300 | 2 | 5.256.175 | 2 | 6.048.000 | 2 | 9.840.000 | 6 | 47.088.475 | 100,00% | 99,13% | 6,00 | 47.088.475 | 0,00% | 23,78% | Tidak Ada |
| | Pemeliharaan Mebel | *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | | 12.000.000 | 0,00 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00 | - | 0,00% | 0,00% | Tidak Ada |
| | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | 19.495.000 | 0,00 | - | 22 | 11.600.000 | 6 | 5.400.000 | 6 | - | 6 | 3.450.000 | 4 | 1.600.000 | 22 | 10.450.000 | 100,00% | 90,09% | 22,00 | 10.450.000 | 0,00% | 53,60% | Tidak Ada |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | | 66.000.000 | 0,00 | - | 1 | 3.325.086 | - | 3.125.000 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3.125.000 | 100,00% | 93,98% | 3,00 | 3.125.000 | 0,00% | 4,73% | Tidak Ada |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | 99,98% | 83,60% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | Tinggi | | | |
| | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN RELAYANAN PUBLIK | IKM (Nilai) | 91,00 | 20.530.500 | 0,00 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 90,50 | - | 0,00% | Kintap | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------|---|---|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--|---------------|---------------|-----------|-------|-------|-----------|
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) | 50.882.538 | 0,00 | - | 2 | 5.075.000 | 2 | 4.725.000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4.725.000 | 100,00% | 93,10% | 2,00 | 4.725.000 | 0,00% | 9,29% | Tidak Ada |
| Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 96,49% | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| 4.123.438.360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | 99,98% | 85,81% | | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |

| | |
|--|---|
| Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : |  |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**): | |

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target pencapaian kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kintap pada tahun 2024 sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 tahun 2015, sebagai berikut :

TABEL T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kintap
Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan/Kabupaten Tanah Laut

| No | Indikator | Satuan | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Daerah | | | Realisasi Capaian | Proyeksi Capaian | Catatan Analisis |
|----|--|------------|------------------------|-----|-----------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024 | Tahun 2024 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | | | 90 | 91 | 92 | 88,05 | 90 | |
| 2 | Rasio Desa mandiri terhadap Jumlah Desa yang ada dikecamatan | Persentase | | | 25 % | 50 % | 75 % | 21,43 % | 25 % | |

Pengukuran kinerja Kecamatan terletak pada sejauh mana capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan .

Hasil pengukuran kemudian dikategorikan seperti pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Kategori Kinerja

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|------------|------------------|------------------|
| I | Lebih dari 90 % | Sangat baik |
| II | 80 s/d 89 % | Baik |
| III | 60 s/d 79 % | Cukup |
| IV | Kurang dari 60 % | Kurang |

Adapun produk dan layanan yang ada di Kecamatan Kintap adalah sebagai berikut :

1. Perekaman Data E-KTP
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Pembuatan Rekomendasi IMB
5. Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7. Pembuatan Surat Keterangan Tentang Usaha (SKTU)
8. Pembuatan Surat Pindah Domisili
9. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
10. Pembuatan Surat Dispensasi Nikah
11. Pembuatan Surat Keterangan Ghaib
12. Pembuatan Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Menyurat

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kintap terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Rasio Desa Mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan, berupa 100 lembar (maksimal) kuisisioner yang dibagikan, sehingga didapat nilai untuk IKM Tahun 2024 adalah 88,05 % dan termasuk kategori **Baik**.

Sedangkan Rasio Desa mandiri terhadap Jumlah Desa yang ada dikecamatan sebesar 3 dari 14 Desa yang ada atau 21,43 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- f. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Seorang Camat mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana dan pelayanan umum
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa

- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.
- Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kecamatan Kintap antara lain :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan yang terampil dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang representatif sehingga menyebabkan pelayanan masih kurang efektif seperti masih belum memadainya bangunan gedung kantor. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan , administrasi dan pelaksanaan SOP pelayanan.
- c. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal karena ada kegiatan yang seharusnya dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
- d. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi (intern) dan lintas sektor (ekstern).
- e. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.
- f. Cukup banyaknya kasus perselisihan dan sengketa di wilayah Kecamatan Kintap, menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi pembangunan

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan Diperoleh Pada umumnya masyarakat pedesaan untuk menginginkan suatu usulan kegiatan di suatu lingkungan baik yang akan dilaksanakan pendanaannya oleh masyarakat itu sendiri/gotong royong/swadaya masyarakat atau melalui APBD harus melakukan rapat kelompok di masyarakat antar RT dan Dusun untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan bijaksana. Dalam forum tersebut untuk mengambil keputusan melibatkan unsur aparat desa, RT, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dusun, BPD, LSM, dan lain-lain. Para pemangku kepentingan masing-masing menyampaikan usulan kegiatan yang dilengkapi dengan data dukung yang akurat dan akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan). Setelah usulan-usulan program terhimpun maka usulan tersebut dituangkan dalam suatu wadah yang diberi nama Forum Musrenbangdes atau suatu wadah yang menampung aspirasi masyarakat yang selanjutnya untuk dibahas dan dievaluasi untuk menentukan skala prioritas sebagai usulan yang final untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang atau SKPD terkait.
2. Kesesuaian dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Dalam menampung aspirasi masyarakat, instansi terkait dapat memberikan arahan mengenai usulan dari masyarakat tersebut, apakah benar-benar sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan dapat mensejahterakan warga setempat. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sepanjang usulan yang dimohonkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, dan usulan-usulan tersebut akan ditindaklanjuti oleh SKPD terkait di tingkat Kecamatan melalui Forum Musrenbang Kecamatan untuk menentukan kesesuaian usulan dan menentukan pengalokasian anggaran yang tersedia dan disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing – masing yang berorientasikan pada Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 yaitu, **pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission**

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kintap

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2026 ini adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kintap

Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kintap

| Tujuan | Sasaran | Indikator |
|--|---|---|
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | | Indek Desa |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik | Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | | Nilai SAKIP Kabupaten |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap | Nilai SAKIP kecamatan Kintap |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Tahun 2026 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2024 – 2026 dan RPJMD Teknokratik Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2029 sudah ditetapkan. Mengacu pada Pasal 147 ayat (2) Permendagri tersebut bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/ kota, sehingga penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/ kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan daerah provinsi sesuai urusan/ bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan permendagri 13 Tahun 2008

Adapun rencana program dan kegiatan sesuai dengan **MAPPING PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** dan di rubah lagi dengan keputusan Mendagri Nomor : 900.15.5-3406 Tahun 2024, Pemuktahiran untuk Tahun 2026 yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Kintap ada **6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan** dengan total dana/ pagu indikatif sebesar **Rp 5.994.441.359** (terlampir), dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 6.062.705
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.205.891
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.854.516.779
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.205.891
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 7.332.623
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 70,000,000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3,000,000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 20,000,000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 300,000,000
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp 96.000.000
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 30,000,000
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 100,000,000
 - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 200,000,000
 - Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 150,000,000
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 70,000,000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 70,000,000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 218.836,074
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 40,000,000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 60,000,000
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel mendapatkan Pagu Anggaran Sebesar Rp 10.000.000
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 25,000,000

- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 24,000,000
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**
- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 6.843,500
3. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum –**
- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4.216,000
4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 130.000.000
 - Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Mendapatkan Pagu Sebesar Rp 30.000.000
 - Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan

Nasional mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.378.125.000

- Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mendapatkan Pagu Sebesar Rp 9.637.228
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 70.353.725

5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 8.984.250
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 18.600.585

6. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan mendapatkan Pagu sebesar Rp 7.527.850
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 35,000,000.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut

| Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab | Lokasi |
|---|--|-------------|---|------------------|---|------------|
| | | | 2026 | | | |
| | | | Target | (Rp) | | |
| -3 | -4 | -5 | -14 | -15 | -18 | -19 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Kintap | Nilai | 93 | Rp 4.295.153.241 | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100% | Rp 10.268.595 | | |
| Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | Rp 6.062.705 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | Rp 4.205.891 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100% | Rp 2.858.715.949 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN | Orang/Bulan | 13 | Rp 2.854.516.779 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 19 | Rp 4.199.169 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | 100% | Rp 400.332.623 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | Rp 7.332.623 | Kec Kintap | Kec Kintap |

| | | | | | | |
|--|--|---------|------|-------------------|------------|------------|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 2 | Rp 70.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Paket | 7 | Rp 3.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 1 | Rp 20.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | Rp 300.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100% | Rp 576.000.000 | | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 2 | Rp 96.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 5 | Rp 30.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | Rp 100.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | Rp 200.000.000 | Dinas PUPR | Kec Kintap |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit | 1 | Rp 150.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100% | Rp 290.836.074 | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | Rp 2.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet | Laporan | 12 | Rp 70.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |

| | | | | | | |
|--|---|---------|------|-------------------|------------|------------|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | 12 | Rp 218.836.074 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100% | Rp 159.000.000 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | Unit | 1 | Rp 40.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara | Unit | 6 | Rp 60.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang dipelihara | Unit | 50 | Rp 10.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara | Unit | 30 | Rp 25.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi | Unit | 2 | Rp 24.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 6.843.500 | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Persen | | Rp 6.843.500 | | |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 1 | Rp 6.843.500 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 4.216.000 | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 100% | Rp 4.216.000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------|------|---------------------|------------|------------|
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | Rp 4.216.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 1.618.115.953 | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen | 100% | Rp 1.618.115.953 | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 18 | Rp 130.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 30 | Rp 30.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya | Orang | 2000 | Rp 1.378.125.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Laporan | 12 | Rp 9.637.228 | Kec Kintap | Kec Kintap |

| | | | | | | |
|--|---|---------|------|------------------|------------|------------|
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 8 | Rp 70.353.725 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 27.584.815 | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persen | 100% | Rp 27.584.815 | | |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa | Dokumen | 24 | Rp 8.984.250 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 2 | Rp 18.600.565 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 42.527.850 | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persen | 100% | Rp 42.527.850 | | |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 1 | Rp 7.527.850 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | Rp 35.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |

Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2025

Untuk Belanja 6 Program, 11 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan

Rp 5.994.441.359

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kintap tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kecamatan Kintap tahun 2024 – 2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Kintap ini merupakan perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026

Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2026 dibuat dalam rangka mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkair dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi Kantor Kecamatan Kintap dan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan ke 4 tahun 2024.

Tahun 2026 , SKPD Kecamatan Kintap akan melaksanakan **6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan** dengan total dana/pagu indikatif sebesar **Rp 5.994.441.359**

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kintap, Penetapan Prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi tugas dan fungsinya.

Kintap, 17 Januari 2025

Camat Kintap



Sutarno, S.Kep, Ns. MM

Pembina Tk 1 (IV/b)

NIP. 19731006 199602 1 001

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut

| Tujuan | Sasaran | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|--|---|---|--|-------------|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---|-------------------|--|------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2026 | | | |
| | | | | | Target | (Rp) | Target | (Rp) | Target | (Rp) | Target | (Rp) | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | (17) | -18 | -19 |
| Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah | | | Nilai SAKIP Kabupaten | Nilai | 70,01 | | 75,00 | | | 76,01 | | 80,01 | | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap | | Nilai SAKIP Kecamatan Kintap | Nilai | 80 | | 81 | | | 82 | | 83 | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Kintap | Nilai | 91 | Rp 4.425.337.476 | 92 | Rp 3.555.931.939 | 93 | Rp 4.295.153.241 | 93 | Rp 12.176.422.656 | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100% | Rp 9.906.084 | 100% | Rp 9.335.087 | 100% | Rp 10.268.595 | 100% | Rp 29.509.766 | | |
| | | Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | Rp 6.430.141 | 7 | Rp 5.511.550 | 7 | Rp 6.062.705 | 21 | Rp 18.004.395 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | Rp 3.475.943 | 4 | Rp 3.823.537 | 4 | Rp 4.205.891 | 12 | Rp 11.505.371 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persen | 100% | Rp 2.362.575.164 | 100% | Rp 2.598.832.681 | 100% | Rp 2.858.715.949 | 100% | Rp 7.820.123.794 | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN | Orang/Bulan | 12 | Rp 2.359.104.776 | 13 | Rp 2.595.015.254 | 13 | Rp 2.854.516.779 | 38 | Rp 7.808.636.810 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 19 | Rp 3.470.388 | 19 | Rp 3.817.427 | 19 | Rp 4.199.169 | 57 | Rp 11.486.984 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persen | 100% | Rp 12.000.000 | | Rp - | | Rp - | 100% | Rp 12.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|------|------------------|------|----------------|------|----------------|------|------------------|------------|------------|
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 12 | Rp 12.000.000 | | | | | 22 | Rp 12.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persen | 100% | Rp 217.519.701 | 100% | Rp 252.571.671 | 100% | Rp 400.332.623 | 100% | Rp 870.423.995 | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | Rp 6.060.019 | 2 | Rp 6.666.021 | 2 | Rp 7.332.623 | 6 | Rp 20.058.662 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Paket | 2 | Rp 32.459.682 | 2 | Rp 35.705.650 | 2 | Rp 70.000.000 | 6 | Rp 138.165.333 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Paket | 7 | Rp 3.000.000 | 7 | Rp 3.000.000 | 7 | Rp 3.000.000 | 21 | Rp 9.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 3 | Rp 20.000.000 | 1 | Rp 20.000.000 | 1 | Rp 20.000.000 | 3 | Rp 60.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | Rp 156.000.000 | 12 | Rp 187.200.000 | 12 | Rp 300.000.000 | 36 | Rp 643.200.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 100% | Rp 1.435.000.000 | 100% | Rp 289.000.000 | 100% | Rp 576.000.000 | 100% | Rp 2.200.000.000 | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 2 | Rp 740.000.000 | 1 | Rp 44.000.000 | 2 | Rp 96.000.000 | 5 | Rp 880.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | Rp 10.000.000 | 5 | Rp 15.000.000 | 5 | Rp 30.000.000 | 12 | Rp 55.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | Rp 35.000.000 | 4 | Rp 30.000.000 | 10 | Rp 100.000.000 | 17 | Rp 165.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | Rp 600.000.000 | | | 1 | Rp 200.000.000 | 2 | Rp 800.000.000 | Dinas PUPR | Kec Kintap |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | Rp 50.000.000 | 1 | Rp 200.000.000 | | | 2 | Rp 250.000.000 | Dinas PUPR | Kec Kintap |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------------|------------|--|
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik | | Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan | Persentase | | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 6.843.500 | | Rp 6.843.500 | | Rp 6.843.500 | | Rp 20.530.500 | | | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | Persen | | Rp 6.843.500 | | Rp 6.843.500 | | Rp 6.843.500 | | Rp 20.530.500 | | | |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 1 | Rp 6.843.500 | 1 | Rp 6.843.500 | 1 | Rp 6.843.500 | 3 | Rp 20.530.500 | Kec Kintap | Kec Kintap | |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 4.216.000 | | Rp 4.216.000 | | Rp 4.216.000 | | Rp 12.648.000 | | | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 100% | Rp 4.216.000 | 100% | Rp 4.216.000 | 100% | Rp 4.216.000 | 100% | Rp 12.648.000 | | | |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | Rp 4.216.000 | 12 | Rp 4.216.000 | 12 | Rp 4.216.000 | 36 | Rp 12.648.000 | Kec Kintap | Kec Kintap | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 1.449.086.306 | | Rp 1.517.023.369 | | Rp 1.618.115.953 | | Rp 4.584.225.628 | | | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persen | 100% | Rp 1.449.086.306 | 100% | Rp 1.517.023.369 | 100% | Rp 1.618.115.953 | 100% | Rp 4.584.225.628 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------------|------------|
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 11 | Rp 99.991.331 | 11 | Rp 99.991.331 | 18 | Rp 130.000.000 | 40 | Rp 329.982.662 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 20 | Rp 20.000.000 | 25 | Rp 25.000.000 | 30 | Rp 30.000.000 | 75 | Rp 75.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya | Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya | Orang | 2000 | Rp 1.250.000.000 | 2000 | Rp 1.312.500.000 | 2000 | Rp 1.378.125.000 | 6000 | Rp 3.940.625.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Laporan | 12 | Rp 8.741.250 | 12 | Rp 9.178.313 | 12 | Rp 9.637.228 | 36 | Rp 27.556.791 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 8 | Rp 70.353.725 | 8 | Rp 70.353.725 | 8 | Rp 70.353.725 | 24 | Rp 211.061.175 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 22.797.368 | | Rp 25.077.105 | | Rp 27.584.815 | | Rp 75.459.288 | | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persen | 100% | Rp 22.797.368 | 100% | Rp 25.077.105 | 100% | Rp 27.584.815 | 100% | Rp 75.459.288 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------------|------------|
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa | Dokumen | 24 | Rp 7.425.000 | 24 | Rp 8.167.500 | 24 | Rp 8.984.250 | 72 | Rp 24.576.750 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 2 | Rp 15.372.368 | 2 | Rp 16.909.605 | 2 | Rp 18.600.565 | 6 | Rp 50.882.538 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN | Nilai IKM Kecamatan Kintap | Nilai | | Rp 31.843.500 | | Rp 37.185.675 | | Rp 42.527.850 | | Rp 111.557.025 | | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persen | 100% | Rp 31.843.500 | 100% | Rp 37.185.675 | 100% | Rp 42.527.850 | 100% | Rp 111.557.025 | | |
| | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 1 | Rp 6.843.500 | 1 | Rp 7.185.675 | 1 | Rp 7.527.850 | 3 | Rp 21.557.025 | Kec Kintap | Kec Kintap |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | Rp 25.000.000 | 12 | Rp 30.000.000 | 12 | Rp 35.000.000 | 12 | Rp 90.000.000 | Kec Kintap | Kec Kintap |

Kintap, 31 Maret 2023

Camat Kintap

Sutarno, S.Kep.Ns., MM
 NIP. 19731006 19602 1 001